



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PERSIAPAN PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DENGAN KARAKTERISTIK BERBASIS TERDEFINISI

4 Agustus 2025



BILITAS APIP LEVEL 3 DAN
TURITAS SPIP LEVEL 3

A PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Kepada

PATI BENGKALIS

Kamis 6 April 2023



NILAI KEBERMANFAATAN YANG DIHARAPKAN

Memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola yang mencegah kecurangan dan mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah



ARAHAN/EKSPEKTASI PRESIDEN DAN *CURRENT ISSUE* YANG TERJADI

ARAHAN/EKSPEKTASI PRESIDEN

Pastikan setiap Rupiah dari uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat yang membutuhkan. Tidak boleh lagi ada toleransi untuk kebocoran, pemborosan, atau pengeluaran yang tidak langsung dalam membantu meringankan beban rakyat. Semua fokus kepada hal produktif yang berdampak nyata.

CURRENT ISSUES

- Permasalahan terkait perencanaan masih belum terselesaikan.
- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN/RPJMD.
- Kelemahan proses pengendalian pada K/L/D.
- Pemda belum memperhatikan pengendalian kecurangan.
- Pemanfaatan Sistem Informasi dalam mendukung tata kelola belum optimal.



INDIKATOR BARU RPJMN TAHUN 2025-2029

- 403 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.08.03 KP: Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional	01 - Terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional	01 - Persentase K/L dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	47,57	72,82	03 - Transformasi Tata Kelola	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		02 - Persentase provinsi dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	39,47	57,89		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		03 - Persentase kab/kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	9,84	50,20		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		04 - Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan intern dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	predikat	- (indikator baru)	Optimal	Optimal		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		05 - Tingkat pemanfaatan hasil pengendalian program prioritas Presiden dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	persen	- (indikator baru)	30	50		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS

memastikan kalibrasi atas 3 (tiga) komponen yaitu SPIP, MRI, dan IEPK.

“Pemda dengan Maturitas SPIP T dengan karakteristik berbasis Terdefinisi” dilakukan evaluasi dan panel kepada Kedeputan atas 3 komponen (SPIP, MRI, IEPK)



Dimungkinkan ada penurunan nilai setiap tahunnya

TAHAPAN

PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

No.	Tahapan	Mulai	Selesai	Keterangan
1)	Penilaian Mandiri	April 2025	31 Mei 2025	Dilaksanakan Pemda
2)	Penjaminan Kualitas	1 Juni 2025	31 Juni 2025	Dilaksanakan APIP Daerah
3)	Evaluasi	1 Juli 2025	31 Agustus 2025	Dilaksanakan BPKP
4)	Panel	1 September 2025	30 September 2025	Dilaksanakan BPKP

No.	Tahapan	Penentuan Objek
1)	Penilaian Mandiri	Seluruh perangkat daerah pada pemda.
2)	Penjaminan Kualitas	<ol style="list-style-type: none">Dilakukan terhadap Perangkat Daerah Wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal.Pastikan sasaran strategis yang disampel sebanyak 30% sasaran strategis (minimal 2 sasaran strategis).Pastikan sampel mewakili 40% anggaran.

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN

- **Penilaian agar dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.**
- **Memantaskan capaian skor SPIP sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.**
- **Penilaian mempertimbangkan hasil konfirmasi atau konfirmatori dari berbagai sumber baik eksternal maupun internal pemda. Diantaranya dari hasil pengawasan, berita media massa, indeks tata kelola dari KL lain, persepsi masyarakat, surat pengaduan, sentimen publik, hal-hal yang dikonsultasikan ke instansi terkait, hasil dari MCP KPK, hasil kejaksaan dsbnya.**
- **Harus memetakan AOI/Permasalahan penyelenggaraan SPIP yang jelas, konkret, tidak normatif, dan dapat diimplementasikan dengan renaksi yang spesifik dan terukur.**
- **Pendalaman terkait dengan adanya kasus hukum pada Pemda.
Pendalaman dalam dapat dilakukan melalui penelusuran pemberitaan /media maupun melalui hasil dari pihak Inspektorat.**
- **Penyelesaian hasil tindak lanjuti Aol penilaian SPIP tahun-tahun sebelumnya.**
- **Untuk setiap unsur SPIP agar dipakai semua metodenya analisis dokumen, observasi, wawancara**
 - **Analisis dan telaah substansi mencakup seluruh komponen penilaian (penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan) untuk memastikan nilai yang diberikan sesuai dengan bukti dan kondisi nyata.**
 - **Pengujian kewajaran nilai dilakukan dengan menerapkan pengujian kewajaran terhadap skor, membandingkan dengan data pembanding, dan standar kelaziman praktik pengendalian.**
 - **Observasi lapangan dan wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi implementasi pengendalian yang diklaim, terutama pada area kritis atau nilai tinggi.**

PERLU PENDALAMAN PELAKSANAAN PM DAN PK DENGAN MEMETAKAN PERMASALAHAN DARI BERBAGAI SUMBER, KARENA DIMUNGKINKAN:

✓ Perencanaan strategis belum mengintegrasikan pendekatan perencanaan berbasis risiko

✓ saat penentuan anggaran pemda belum mempertimbangkan risiko

- ✓ Masih banyaknya masalah menjadi indikasi:
- Tidak cukupnya desain/prosedur/kebijakan yang mengatur sub unsur
 - Masalah pada komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan SPIP
 - Permasalahan pembinaan pengelolaan SDM yang dihubungkan dengan ketepatan kompetensi yang dibutuhkan OPD, serta pendelegasian wewenang
 - Proses pengelolaan risiko yang belum memadai dan belum dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi program
 - Ketidacukupan reviu dan monitoring kinerja secara konsisten dan disiplin
 - Tata kelola data lemah
 - Evaluasi berkelanjutan oleh manajemen dan APIP kurang



PELAKSANAAN PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Tujuan penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk:

1

Memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

2

Secara khusus penilaian ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa rencana intervensi sektoral pemerintah daerah memiliki keterkaitan dan berkesinambungan antara lain:

- Program yang terkait dan selaras dengan *ultimate outcome*.
- Kegiatan yang terkait dan selaras dengan program.
- Subkegiatan yang terkait dan selaras dengan kegiatan.

3

Keselarasan logika hubungan sasaran, program, output, *outcome*: Pastikan bahwa setiap elemen dalam sebuah perencanaan berhubungan secara logis dan mendukung pencapaian tujuan akhir.

4

Konsistensi dan kelayakan strategi: Lakukan analisis konsistensi dan kelayakan strategi yang disusun yakni melihat sejauh mana semua elemen strategi saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Kelayakan strategi mengacu pada sejauh mana strategi dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia dan dalam kerangka waktu yang ditetapkan.

5

Pastikan poin 3 dan 4 tersebut didukung dengan:

- (1) perencanaan yang ada telah dilakukan analisis risiko dan rencana mitigasi yang memadai dan hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan perencanaan dan pengembangan strategi mitigasi.
- (2) APIP melakukan evaluasi terhadap rencana strategis pemda untuk memastikan bahwa rencana tersebut realistis, dapat dicapai, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

PELAKSANAAN PENILAIAN UNTUK 3 KOMPONEN SPIP (PENETAPAN TUJUAN, STRUKTUR PROSES, DAN PENCAPAIAN TUJUAN)

Dalam Penilaian agar setiap Asesor OPD mempunyai tambahan kertas kerja yang berisi penjelasan secara tertulis dalam hal sebagai berikut:

✓ Proses penyusunan perencanaan strategis, sudahkah diintegrasikan pendekatan perencanaan berbasis risiko

✓ Proses penentuan anggaran pemda, sudahkah mempertimbangkan risiko

✓ Penjelasan komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan SPIP dalam bentuk apa

✓ Penjelasan upaya mengantisipasi permasalahan pembinaan pengelolaan SDM yang dihubungkan dengan ketepatan kompetensi yang dibutuhkan OPD, serta pendelegasian wewenang

✓ Proses pengelolaan risiko yang belum memadai dan belum dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi program

✓ Ketidacukupan reviu dan monitoring kinerja secara konsisten dan disiplin dari berbagai bentuk tugas dan proyek

✓ Proses Tata Kelola data, sudahkah cukup memadai

✓ Evaluasi berkelanjutan oleh manajemen dan APIP, sudah seintensif apa

✓ Seberapa banyak pengambilan keputusan Kepala Daerah dan Kepala OPD berdasarkan risiko, jelaskan realisasi jenis keputusan dan risikonya



LANJUT KE KERTAS KERJA DUKUNGAN.....

